

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Zaenuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Anshoruddin, H., 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim, A. Ridwan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichitar Baru, Jakarta.
- Kohar, A., 1985, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Bina Indra Karya, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum, Center for Documentation Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Nurita, Emma, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.
- Situmorang, Victor M., Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, R., 2010, *Perjanjian Di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan  
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*  
2019 (COVID-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021  
Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat  
*Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan  
Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor  
Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung  
Keberlangsungan Usaha.

### C. Jurnal/Tesis

Alwajdi, Muhammad Farid, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam  
Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal*  
*Rechtsvinding*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2020, Badan Pembinaan  
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia.

Idris, Nuria Mentari, “Pelaksanaan Cyber Notary Serta Sinkronisasi Undanag-  
Undang Jabatan Notaris Terkait Risalah Rapat Umum Pemegang  
Saham Perseroan Terbatas Melalui Video Konferensi”, *Tesis*, Program  
Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah  
Mada, Yogyakarta, 2017.

Indrajab, Fidwal, “Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari  
Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo”, *Tesis*, Program Studi  
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta, 2014.

Makarim, Edmon, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum  
Terhadap Kemungkinan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume  
41, Nomor 3, Juli-September 2011, Fakultas Hukum, Universitas  
Indonesia.

Padmaputra, R. Leviandi Pralega, “Penyelenggaraan Cyber Notary di  
Indonesia Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Purwaningsih, Endang, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Puspitaningrum, Jayanti, “Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Melalui Media Telekonferensi”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2014

Rahman, Fikri Ariesta, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap”, *Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2018, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Rizki, Rela, Nurlaily, Hasrina, Artha, Demi, “Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Incio Legis*, Volume 1, Nomor 7, Oktober 2020, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

Sari, Dewa Ayu Widya, R.A Retno Murni, I Made Udiana, “Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2017, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.

Wibawa, Ida Bagus Putu Pramarta., “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 3, Desember 2018, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.

Yusuf, Rezky Aulia, “Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris di Masa Darurat Kesehatan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Bali, 2021.

#### D. Internet

Bogor-Kominfo. “Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”, <https://kominfo.go.id/content/detail/25477/pemerintahte>

*tapkan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat/0/berita* (diakses 29 September 2021).

Jaya, Surya. “Cybernotary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian”, <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/05/15/cyber-notary-dalam-perspektif-hukum-pembuktian/> (diakses tanggal 24 September 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> (diakses tanggal 3 Januari 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telekonferensi>, (diakses tanggal 29 September 2021).

Pelayananpublik.id. “Pengertian Telekonferensi atau Teleconference, Tujuan, Keuntungan, dan Jenisnya”, <https://pelayananpublik.id/2020/03/28/pengertian-telekonferensi-atau-teleconference-tujuan-keuntungan-dan-jenisnya/> (diakses tanggal 13 September 2021).